



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TANGAH, PEMERINTAHAN
NAGARI KOTO TUO,
PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO, PEMERINTAHAN NAGARI
PAMATANG PANJANG DAN
PEMERINTAHAN NAGARI RANAH KOTO TINGGI
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan cita-cita kehidupan masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Parit di Kecamatan Koto Balingka.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Tangah, Pemerintahan Nagari Koto Tuo, Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo, Pemerintahan Nagari Pamatang Panjang dan Pemerintahan Nagari Ranah Koto Tinggi di

Kecamatan Koto Balingka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TANGAH, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TUO, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO, PEMERINTAHAN NAGARI PAMATANG PANJANG DAN PEMERINTAHAN NAGARI RANAH KOTO TINGGI DI KECAMATAN KOTO BALINGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Nagari Koto Tengah;
- b. Nagari Koto Tuo;
- c. Nagari Koto Nan Duo;
- d. Nagari Pamatang Panjang; dan
- e. Nagari Ranah Koto Tinggi.

- (2) Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berasal dari Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka dengan Kode Nagari 13.12.08.2001.

Bagian Kedua
Nagari Koto Tangah

Pasal 3

Nagari Koto Tangah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 5.645 jiwa/1.382 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Parit yang terdiri dari :

- a. Jorong Lubuk Gadang;
- b. Jorong Ulu Simpang;
- c. Jorong Labuai; dan
- d. Jorong Tamiang Ampalu.

Pasal 4

- (1) Nagari Koto Tangah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pamatang Panjang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Parit;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Nan Duo dan Nagari Koto Tuo; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Situak Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Koto Tangah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Tangah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Koto Tangah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 59,851 KM².

Bagian Ketiga
Nagari Koto Tuo
Pasal 6

Nagari Koto Tuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 4.466 jiwa/1.023 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Parit yang terdiri dari :

- a. Jorong Setia Baru;
- b. Jorong Air Balam;
- c. Jorong Siduampan;
- d. Jorong Kampung Raudah;
- e. Jorong Batas Tarok; dan
- f. Jorong PT. BPP.

Pasal 7

- (1) Nagari Koto Tuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Nan Duo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ranah Koto Tinggi;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ala Bangli Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Tangah dan Nagari Parit.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Koto Tuo sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Tuo ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Koto Tuo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 63,260 KM².

Bagian Keempat
Nagari Koto Nan Duo

Pasal 9

Nagari Koto Nan Duo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 4.090 jiwa/1.071 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Parit yang terdiri dari :

- a. Jorong Simpang; dan
- b. Jorong Air Runding.

Pasal 10

- (1) Nagari Koto Nan Duo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Batahan Selatan, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tuo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Tengah; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Koto Nan Duo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Nan Duo Ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Koto Nan Duo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 69,125 KM².

Bagian Kelima

Nagari Pamatang Panjang

Pasal 12

Nagari Pamatang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 4.728 jiwa/1.071 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Parit yang terdiri dari :

- a. Jorong Tambang Padang;
- b. Jorong Aek Nabirong;
- c. Jorong Simaninggir;
- d. Jorong Aek Garingging;
- e. Jorong Pengambiran; dan
- f. Jorong Rura Patontang.

Pasal 13

- (1) Nagari Pamatang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Batahan Utara;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tengah dan Nagari Situak ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Pamatang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pamatang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Pamatang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 88,092 KM².

Bagian Keenam

Nagari Ranah Koto Tinggi

Pasal 15

Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan jumlah penduduk 3.665 jiwa/811 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Parit yang terdiri dari :

- a. Jorong Sikabau; dan
- b. Jorong Tanah Datar;
- c. Jorong Air Jernih;
- d. Jorong Sukaramai.

Pasal 16

- (1) Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Parit dan Nagari Koto Sawah Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Tuo dan Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Sawah Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan Kecamatan Sungai Aur.

- (2) Peta batas wilayah Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ranah Koto Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Luas wilayah Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah 50,563 KM².

Pasal 18

Dengan dibentuknya Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Parit dikurangi dengan Wilayah Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 15.

BAB III

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua
Kewenangan Nagari

Pasal 21

Kewenangan Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berakala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 22

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penjabat Wali Nagari

Pasal 23

Dengan dibentuknya Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Koto Tangah, Penjabat Wali Nagari Koto Tuo, Penjabat Wali Nagari Koto Nan Duo, Penjabat Wali Nagari Pamatang Panjang dan Penjabat Wali Nagari Ranah Koto Tinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018;

Pasal 26

- (1) Perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari Parit yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi menjadi perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari di Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi di atur dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Parit mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Parit untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Koto Tangah, APB Nagari Koto Tuo, APB Nagari Koto Nan Duo, APB Nagari Pamatang Panjang dan APB Nagari Ranah Koto Tinggi;
- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 19 dibebankan kepada APB Nagari Parit;

Pasal 28

Sebelum Pemerintah Nagari Koto Tangah, Pemerintah Nagari Koto Tuo, Pemerintah Nagari Koto Nan Duo, Pemerintah Nagari Pamatang Panjang dan Pemerintah Nagari Ranah Koto Tinggi dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Parit tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Koto Tangah, Pemerintah Nagari Koto Tuo, Pemerintah Nagari Koto Nan Duo, Pemerintah Nagari Pamatang Panjang dan Pemerintah Nagari Ranah Koto Tinggi;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Nagari Koto Nan Duo, Nagari Pamatang Panjang dan Nagari Ranah Koto Tinggi;

Pasal 30

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Koto Rungah, Perangkat Nagari Persiapan Koto Tuo, Perangkat Nagari Persiapan Koto Nan Duo, Perangkat Nagari Persiapan Pamatang Panjang dan Perangkat Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi diangkat menjadi Perangkat Nagari Koto Rungah, Perangkat Nagari Koto Tuo, Perangkat Nagari Koto Nan Duo, Perangkat Nagari Pamatang Panjang dan Perangkat Nagari Ranah Koto Tinggi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (13/13/2020).

**PEMENJELASAN
ATAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TANGAH,
PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TUO,
PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO,
PEMERINTAHAN NAGARI PAMATANG PANJANG DAN
PEMERINTAHAN NAGARI RANAH KOTO TINGGI
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 5